



# BULLETIN APKI

**BERITA INDUSTRI PULP DAN KERTAS INDONESIA**



Diterbitkan oleh:  
Asosiasi Pulp dan  
Kertas Indonesia  
STT  
no.1782/SK/DITJEN/PP  
G/STT/1993,  
Tanggal 20 April 1993

## Melihat Masa Depan Industri Pulp & Kertas

### SUSUNAN REDAKSI

Pimpinan Umum : Ketua Umum APKI  
Penanggung Jawab : Direktur Eksekutif  
Pelaksana : Sekretariat APKI  
Alamat Redaksi : Plaza Permata Lt.9,  
Jl. MH. Thamrin no.57  
Jakarta 10350  
Telp. : 021-3192 6084  
Fax. : 021-391 1351  
Email : info@apki.net

### DAFTAR ISI

- Kata Pengantar dari Ketua Umum.....1
- Paperless Tidak Berpengaruh pada Pertumbuhan Industri Pulp dan Kertas di Dunia dan Indonesia.....3
- Hutan Tanaman Industri (HTI) yang Ramah Lingkungan dan Rendah Karbon.....5
- Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Produk Pulp dan Kertas Indonesia.....7
- Pentingnya SNI dalam menghadapi MEA 2015.....11
- Serba Serbi
  - Mendorong Industri Kertas yang Berkelanjutan..... 14
  - APKI Menginginkan Adanya Pemberian Insentif Pada Industri Pulp dan Kertas.....15
  - Valmet.....16
  - Potensi Kertas Cetak & Tulis di Pasar Asia.....17
  - Kesuksesan yang Berkelanjutan ITC Bhadrachalam Pulp & Paper.....18
  - Rapat Kerja Anggota APKI Surabaya.....20
  - Kerjasama APKI dan IDH.....22

## **KATA PENGANTAR**

Dalam penerbitan kali ini buletin APKI menyampaikan 4 (empat) tulisan pokok yang berkaitan dengan *paperless*, penebangan hutan yang dapat mereduksi emisi karbon, dumping dan *safeguard*, serta Standar Nasional Indonesia (SNI).

Fenomena *paperless* yang saat ini sedang merebak disinyalir tidak akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan industri pulp dan kertas di dunia maupun di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh *The Economist* tahun 2012, konsumsi kertas dunia akan meningkat sebesar 50% dalam 30 tahun terakhir. Prospek industri kertas ke depan juga diprediksi cukup baik karena produk kertas tidak dapat dipisahkan dengan gaya kehidupan sehari-hari.

Produksi kertas ditentukan dari ketersediaan sumber bahan baku terutama kayu yang dihasilkan dari hutan produksi yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Namun dalam melakukan kegiatan usaha, perusahaan HTI harus dapat menjalankan kegiatan usahanya antara lain dengan menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainability*) dan upaya mitigasi perubahan iklim. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan proses penebangan yang dapat mereduksi emisi karbon (*Reduce Impact Logging and Low Carbon Emission/RIL-C*). Apabila hal tersebut dilakukan maka perusahaan tentunya telah ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus juga mengurangi dampak perubahan iklim serta dapat menjaga "image"-nya sebagai pelaku kegiatan usaha yang ramah lingkungan.

Pertumbuhan sektor ekonomi yang terus meningkat mengakibatkan permintaan kertas juga meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia termasuk juga di Indonesia. Namun di balik kebutuhan kertas yang tinggi, kini industri kertas pun harus menghadapi serangan dumping ataupun *safeguard* akibat produk industri kertas luar

negeri. Oleh karena itu diperlukannya penerapan anti dumping *dan/atau safeguards* untuk dapat memberikan kesempatan kepada industri/produsen dalam negeri agar dapat meningkatkan daya saingnya terhadap barang impor.

Meningkatkan daya saing industri kertas dalam menghadapi MEA 2015 sudah merupakan suatu keharusan yang dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi baik terhadap produk, personel, maupun sarana dan prasarana pendukungnya. Indonesia telah mensahkan banyak Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk-produk pulp dan kertas termasuk cara ujinya. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong tersedianya produk industri pulp dan kertas yang telah memenuhi sejumlah kriteria, seperti keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan lingkungan. Dengan demikian diharapkan SNI-SNI tersebut dapat mengamankan pasar domestik dari serbuan produk pulp dan kertas dari negara lain.

Semoga semua informasi yang ditampilkan dalam buletin ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Terima kasih

Ketua Umum APKI

PAPERLESS TIDAK BERPENGARUH PADA PERTUMBUHAN INDUSTRI  
PULP DAN KERTAS DI DUNIA DAN INDONESIA

Kertas mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di dunia maupun di Indonesia secara luas. Namun, sepertinya keberadaan kertas semakin terancam oleh media digital atau *paperless era*. Padahal banyak fungsi kertas yang tidak bisa digantikan oleh media digital seperti *e-book* dan penelitian terhadap kertas menunjukkan bahwa membaca dari media cetak lebih aman terhadap lingkungan terutama dilihat dari pemakaian energinya.

Beberapa penelitian telah dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri yang menganalisa perbedaan efektifitas dalam berkomunikasi antara buku dan *e-book*. Hasilnya menunjukkan bahwa media cetak seperti majalah dan buku-buku lainnya mempunyai strategi pemasaran untuk menarik minat pembacanya terhadap iklan yang dipasang didalamnya. Selain itu, media cetak seperti buku lebih mencerdaskan otak pembacanya daripada membaca *e-book* karena bacaan dalam buku yang lebih ril dapat merangsang cara kerja otak kanan manusia dalam menyimpan memori. Demikian pula halnya dengan pemasangan iklan dalam majalah akan memberikan jalan terbaik bagi otak kanan manusia untuk lebih merespon dan mengingat iklan yang terpasang berbentuk fisik daripada media digital.

Fakta lainnya menunjukkan bahwa media digital memang tidak memerlukan waktu yang lama dalam menyampaikan berita, namun media cetak memiliki kelebihan dalam menyampaikan pesan melalui narasi yang tegas dan lebih bertutur.

Terkait dengan isu penggunaan kertas dan dampaknya terhadap lingkungan hidup, berita di kertas koran atau media cetak lainnya akan lebih ramah lingkungan daripada membaca berita secara *online*. Kontribusi media cetak seperti buku, koran dan lain sebagainya terhadap pemanasan global lebih rendah 10 kali lipat jika dibandingkan dengan

penggunaan media digital akibat pemanfaatan energinya (BAPC, 2012). Sebuah CD atau DVD menghasilkan 300-350 gram CO<sub>2</sub> per buah sedangkan buku dengan 100 halaman berwarna hanya menghasilkan sekitar 80 gram CO<sub>2</sub> sehingga membaca koran atau media cetak lainnya menghasilkan CO<sub>2</sub> lebih rendah per tahunnya daripada membaca berita online (Liverman, 2009).

Media online dengan pemanfaatan teknologi digital pasti akan memberikan dampak pada industri kertas antara lain dengan mengubah cara orang mendapatkan dan menangani informasi. Namun, pada kenyataannya, permintaan kertas koran dan kertas untuk majalah walaupun menurun, namun permintaan kertas lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di lain pihak, meningkatnya penggunaan media digital, permintaan kertas kemasan menjadi meningkat sebagai hasil dari revolusi digital. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital tidak semata-mata menimbulkan dampak negative terhadap industri kertas. Kertas tisu juga akan terus menunjukkan permintaan yang kuat sebagai produk yang tak tergantikan. Sementara itu, banyak orang masih menikmati menggunakan produk kertas untuk membaca dan menulis dan di mana media digital tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

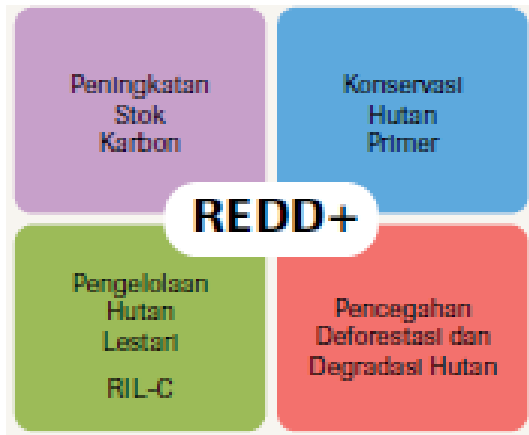
Permintaan akan produk kertas untuk jenis-jenis tertentu ada yang terus bertumbuh dan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan teknologi yang semakin berkembang. Oleh karena itu yang lebih diperlukan adalah bagaimana strategi pemasaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kertas kepada masyarakat.



## HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN RENDAH KARBON

Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Dirjen BUK) dalam *Workshop Sattelite Account* memaparkan bahwa luas hutan di Indonesia saat ini mencapai 127,4 juta hektar, dengan pembagian untuk hutan produksi sebesar 75,4 juta hektar (57%), hutan lindung sebesar 30,3 juta hektar (23%), dan hutan konservasi sebesar 21,7 hektar (20%). Alokasi yang digunakan untuk HTI sampai tahun 2020 yaitu sebesar 8 juta hektar atau sekitar 1/10 dari total luas hutan produksi. Oleh karena itu sorotan dunia begitu besar terhadap kondisi kehutanan di Indonesia, karena hutan produksi Indonesia yang luas tersebut memiliki peranan yang penting dalam memitigasi perubahan iklim dunia. Pemerintah Indonesia pun telah menempatkan prioritas pembangunan sektor kehutanan pada rencana strategis lingkungan hidup dan pencegahan bencana terkait dengan mitigasi perubahan iklim seperti yang tertuang di RPJM tahun 2010-2014. Pengelolaan hutan di Indonesia khususnya Hutan Tanaman Industri (HTI) mulai dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan hutan secara lestari atau *Sustainable Forest Management (SFM)*.

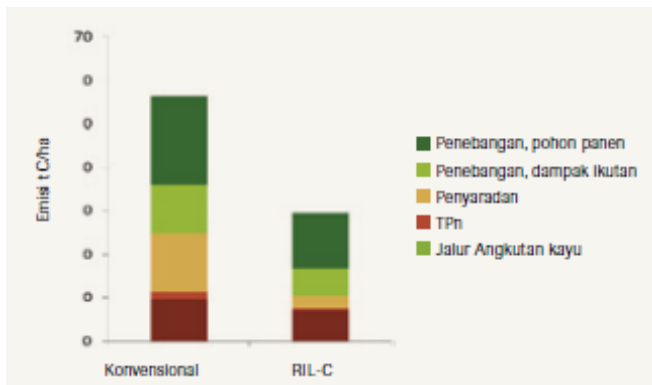
Kriteria dan indikator SFM ditetapkan antara lain adalah mengurangi emisi yang terjadi akibat deforestasi dan degradasi hutan atau lebih dikenal sebagai program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)* yang dapat antara lain meningkatkan serapan karbon. Kontribusi penyerapan karbon di hutan produksi, pada tahun 2006-2009, mencapai 403,63 juta ton atau hampir 79,3% dari penyerapan karbon di seluruh Indonesia (*The Nature Conservancy Program Terrestrial Indonesia, 2013*). Potensi penyerapan karbon yang besar ini belum sepenuhnya diperhitungkan dan diakui secara internasional sebagai kontribusi pengurangan emisi GRK, karena permasalahan metodologi yang belum diharmonisasikan untuk saling mendapatkan pengakuan (*mutual recognition*) cara perhitungan dan pengukurannya.



Sumber: *The Nature Conservancy Program Terrestrial Indonesia*, tahun 2013

Pengelolaan hutan secara lestari dapat dilakukan melalui beberapa tahapan seperti yang terlihat dalam gambar di samping ini, termasuk penebangan hutan yang mempunyai dampak emisi karbon yang rendah (*Reduce Impact Logging and Low Carbon Emission/RIL-C*). Program RIL-C tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik dan teknologi penebangan yang ramah lingkungan, seperti *monocable winch* (MCW) atau yang umum dikenal dengan sebutan mesin pancang yang

ramah lingkungan dalam kegiatan penebangan. Penggunaan mesin pancang akan mengurangi emisi karbon dari kegiatan penebangan hutan, juga dapat mengurangi limbah dari penebangan, serta meningkatkan produktivitas panen.



Sumber: *The Nature Conservancy Program Terrestrial Indonesia*, tahun 2013

RIL-C adalah bagian penting dari sistem pengelolaan hutan yang diperbaiki (*improved forest management system*) dalam perspektif perubahan iklim. Perbaikan dari sistem pemanenan hutan konvensional yang berjalan saat ini (BAU) dengan penerapan sistem pemanenan yang ramah lingkungan seperti RIL-C diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap peran

pengelolaan hutan produksi alam dalam penurunan emisi karbon sektor kehutanan. Penerapan RIL-C dalam pemanenan hutan tidak akan meningkatkan biaya produksi kayu tetapi justru dapat menekan biaya pada komponen perencanaan dan pemanenan sebesar 15-40% dari BAU. Sementara itu, kerusakan tegakan menjadi jauh lebih sedikit dan potensi kayu (dari *biomass recovery*) untuk panen pada rotasi berikutnya akan lebih cepat dapat tercapai. Dengan penerapan RIL-C dalam kegiatan pemanenan hutan tidak ada hal yang

memberatkan Unit Manajemen baik dari segi finansial maupun teknis karena praktik RIL-C dapat dilakukan dengan peralatan pembalakan yang ada dan atau modifikasinya. Namun yang lebih diperlukan adalah penyiapan sumber daya manusia yang terlatih. Penerapan RIL-C dapat menunjukkan peran hutan produksi dalam perubahan iklim dan juga akan memudahkan fungsi pengawasan karena RIL-C hanya dapat dilaksanakan apabila data inventarisasi dan perencanaan dilakukan dengan benar.

### DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP PRODUK INDUSTRI PULP DAN KERTAS INDONESIA

Akhir-akhir ini berbagai negara telah melakukan berbagai kebijakan perdagangan yang sifatnya protektif (restriktif) yang antara lain bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk/barang impor sehingga dikenal lah istilah dumping, subsidi, dan *safeguard*. Berdasarkan data *World Trade Organization* (WTO) telah terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2012 dari 308 menjadi 407 kasus pada 2013 terkait kebijakan perdagangan baru yang diterbitkan oleh 130 negara anggota WTO, dimana 217 diantaranya berupa kebijakan anti dumping dan *safeguard*. Sepanjang tahun 1995-2013 tuduhan dumping, subsidi, dan *safeguard* terhadap Indonesia adalah sebanyak 250 kasus. WTO sendiri adalah suatu organisasi yang didasarkan pada aturan-aturan, beranggotakan 160 negara termasuk Indonesia, dengan total perdagangan dunia sekitar 98%. Indonesia telah meratifikasi *WTO Agreement* dengan UU No 7 Tahun 1994, yang berarti aturan-aturan tersebut telah menjadi bagian dari hukum di Indonesia.

Pembaca harus memahami terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud dengan dumping dan *safeguard*. Dumping merupakan suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau Negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri. Sedangkan *safeguard* (Tindakan Pengamanan Perdagangan) merupakan tindakan untuk



melindungi produsen dalam negeri dari ancaman kerugian serius yang dialami akibat lonjakan jumlah (volume) barang impor. Tindakan *safeguard* dapat berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), kuota, atau kombinasi antara keduanya. Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dapat diberlakukan sebagai upaya dalam mengembalikan kerugian finansial yang dialami. BMAD pernah diterapkan oleh Indonesia pada tahun 2004-2011 terhadap produk *uncoated writing & printing paper* yang berasal dari Finlandia, Republik Korea, India, dan Malaysia.

Permasalahan dumping ditangani oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sedangkan *safeguard* oleh KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) yang berada dibawah Kementerian Perdagangan. Untuk dapat mempertahankan pemasaran produk-produk Indonesia di pasar domestik dan juga untuk meningkatkan ekspor maka perangkat-perangkat (*tools*) pengamanan perdagangan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan WTO perlu dioptimalkan penggunaannya.

Dengan akan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 maka Indonesia harus segera menetapkan strategi untuk memperkuat daya saing dalam merebut pasar ASEAN bahkan pasar dunia, sehingga devisa negara akan meningkat. Namun saat ini yang terjadi adalah membanjirnya produk-produk kertas impor di pasar domestik. Akan berlakunya MEA tersebut akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN sehingga dapat menjadi pasar bagi produk-produk negara lainnya, tetapi apabila daya saing produk-produk Indonesia dapat lebih ditingkatkan maka selain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, kita masih dapat melakukan ekspor sehingga devisa negara akan meningkat.

Industri pulp dan kertas di Indonesia telah menghadapi beberapa kasus terkait anti dumping diantaranya dari Korea Selatan untuk produk *uncoated paper and paper board used for writing, printing, or other graphic purpose* serta *carbon paper, self copy paper and other copying atau transfer paper*. Pada tahap akhir penyelidikan yaitu setelah lebih kurang 3 (tiga) tahun diketahui bahwa Korea Selatan telah melakukan kesalahan prosedur dalam

penyelidikan anti dumping kertas dari Indonesia, sehingga kasus ini akhirnya tidak dilanjutkan.

Setelah itu ada tuduhan Jepang pada Juni 2012 kepada 11 (sebelas) pabrik kertas terkait dengan produk *uncoated cut sheet paper* dimana pada akhirnya Indonesia memenangkan perkara ini karena tuduhan tersebut tidak benar. Dalam proses penyelesaiannya diperlakukan waktu lebih kurang 2 (dua) tahun dan juga biaya yang cukup besar untuk menerjemahkan semua dokumen ke bahasa Jepang dan lain sebagainya. Demikian pula halnya dengan tuduhan Malaysia terhadap produk kertas koran dalam bentuk gulungan, dimana saat ini sedang dilakukan penyelidikan kembali oleh WTO. Selain itu, Pakistan juga melakukan tuduhan terhadap produk kertas duplex, kemudian Indonesia membawa perkara ini ke WTO, dan pada akhirnya Pakistan pada tanggal 2 Juni 2014 secara resmi mengumumkan penghentian (*termination*) penyelidikannya. Penyelidikan anti dumping dapat dilakukan apabila produksi pemohon dan yang mendukung permohonan untuk produk sejenis yang dituduh berjumlah 25% atau lebih dari total produksi barang sejenis yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri.

Sedangkan untuk kasus-kasus kebijakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap produk kertas karton pernah dilakukan oleh Filipina dengan memberlakukan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Akan tetapi hasil akhir dari penyelidikan ini menyebutkan bahwa produk kertas karton Indonesia terbukti tidak menyebabkan kerugian serius di pasar domestik negara itu. Thailand juga melakukan tuduhan *safeguard* terhadap kertas fotokopi asal Indonesia, akan tetapi sampai saat ini belum ada kelanjutannya karena situasi politik di Thailand yang belum kondusif. Ada 2 (dua) industri Dalam Negeri meminta perlindungan *safeguard* terhadap impor kertas dan kertas karton dilapisi satu atau kedua sisinya (*coated paper*) yang berasal dari China, Korea Selatan, Jepang, Finlandia, Swedia, dan lain-lain. Kasus ini masih bergulir dan telah mulai dilakukan penyelidikan sejak 20 Juni 2014. Syarat bagi suatu produk yang akan diajukan *safeguard* harus mencapai 50% atau lebih produksi nasional dan mengalami lonjakan impor secara absolut atau relatif tidak kurang dari 3 (tiga) tahun terakhir.

Peranan KADI maupun KPPI sebagai lembaga resmi yang dibentuk Pemerintah sangatlah penting, kedua lembaga tersebut harus saling bersinergi untuk membantu penyelidikan benar atau tidaknya tuduhan anti dumping dan *safeguard* tersebut. Dengan demikian kalangan dunia usaha khususnya industri pulp dan kertas tidak akan dirugikan. Terlepas dari apakah nantinya tuduhan tersebut benar atau tidak, APKI sebagai Asosiasi yang menaungi pelaku kegiatan industri pulp dan kertas di Indonesia mempunyai peran penting untuk membantu memfasilitasi para anggotanya yang sedang menghadapi kasus seperti ini. Namun semua pihak terkait, baik perusahaan tertuduh, asosiasi, maupun pemerintah harus bekerjasama sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing sehingga penyelidikan dapat berjalan baik dan tidak merugikan kalangan produsen. Pada umumnya penyelesaian kasus ini memakan waktu yang tidak sebentar, sekitar 2-10 tahun dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Tak hanya dumping dan *safeguard* yang mengancam daya saing produk kertas di Indonesia, ada hal lain yang tidak kalah penting yakni isu *black campaign*. *Black Campaign* kadang juga tidak dapat dihindari karena isu lingkungan dan keberlanjutan (*sustainability*) sudah menjadi trend penting di dunia. Saat ini kesadaran akan pentingnya lingkungan menjadi perhatian banyak pihak termasuk LSM maupun pemerhati lingkungan baik ditingkat global, regional maupun nasional. Tidak tertutup kemungkinan bahwa apa yang dituduhkan oleh kalangan LSM tersebut belum tentu benar adanya, sehingga harus di klarifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peran pemerintah menjadi sangat penting untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar dan bukan berlandaskan atas data dan informasi yang ilmiah.

Selama tahun 2013, setidaknya ada 9 (sembilan) kasus yang menimpa industri pulp dan kertas Indonesia dari LSM dalam negeri maupun luar negeri. Kasus yang sering dituduhkan meliputi kerusakan hutan/deforestasi, punahnya spesies langka (flora dan fauna), boikot kertas Indonesia yang tidak ramah lingkungan, kebakaran hutan, tenaga kerja di bawah umur, dan lain-lain.

Perdagangan yang adil menjadi kunci sukses bagi sistem perdagangan dunia, dengan harapan setiap produsen maupun negara harus mendukung berjalannya sistem yang ada dengan bersikap kooperatif, sportif dan bijaksana.

### PENTINGNYA SNI DALAM MENGHADAPI MEA 2015

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera diberlakukan pada tahun 2015 yang akan datang. Masing-masing negara tentunya akan mempersiapkan strategi terbaiknya untuk meningkatkan daya saing menghadapi pasar bebas tersebut. Merujuk pada Laporan Daya Saing Global 2013-2014, peringkat daya saing Indonesia di kawasan Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ada di urutan kelima, dibawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Padahal Indonesia adalah Negara yang terbesar di ASEAN baik dilihat dari luas wilayah, kekayaan sumber daya alam maupun jumlah penduduknya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia adalah dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap produk-produk Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 52 Ayat 2. Penerapan SNI dipercaya dapat melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk impor non standar. Kementerian Perindustrian telah menerapkan SNI untuk 400 jenis produk pada tahun 2013, lebih dari 100 jenis produk sudah diajukan ke *World Trade Organization* (WTO) untuk segera disahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara hukum internasional.

Kekhawatiran dari pelaku usaha terkait penerapan SNI secara wajib diantaranya karena lamanya waktu yang diperlukan, minimnya tenaga ahli, lembaga sertifikasi, prasarana pengujian hingga laboratorium yang tak memadai, serta besarnya biaya yang dibutuhkan. Perlu digaris bawahi bahwa penerapan SNI harus didukung oleh ilmu pengetahuan dan

teknologi sehingga mendorong peran SNI sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing Indonesia agar lebih siap menghadapi persaingan global.

Pemenuhan SNI bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan juga menjangkau aspek teknis produksi dalam menghasilkan produk sesuai standar. Semua tahapan atau prosedur untuk memenuhi SNI membutuhkan biaya dan waktu. Biaya merupakan permasalahan yang tak kalah penting, karena beban biaya pengujian sertifikasi tidaklah murah, selain itu lokasi tempat pengujian juga belum tersebar secara merata di wilayah Indonesia.

Hal yang mendasar bagi pemenuhan SNI yakni kesadaran pengusaha dan masyarakat akan pentingnya penerapan SNI untuk menjamin keamanan juga keselamatan, kesehatan bagi manusia sebagai konsumen dan juga lingkungan sekitarnya dari suatu produk. Kesadaran konsumen mulai meningkat dengan adanya perubahan pola pikir dan pola hidup. Produk dapat dikatakan aman ketika komponen penyusunnya bukan berasal dari bahan berbahaya maupun beracun yang dapat mengganggu kesehatan manusia maupun ramah lingkungan. Selain itu juga proses pembuatannya juga harus menerapkan kaidah-kaidah keberlanjutan. Industri pulp dan kertas di Indonesia memproduksi berbagai jenis produk kertas diantaranya tisu, kertas, kemasan makanan, karton, dan lain sebagainya dimana keamanan dan keselamatan kerja dalam proses produksinya ditinjau baik dari aspek lingkungan hidup maupun kualitasnya.

Sebuah produk yang diproduksi sesuai dengan standar yang berlaku dipercaya sebagai sebuah produk yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga produk tersebut laku dijual dan keuntungan ekonomi pun dapat tercapai. Dengan diterapkannya SNI, maka diharapkan terjadi peningkatan produktivitas, efisiensi, peningkatan kualitas produk dan sumber daya manusia, serta lingkungan yang bersih dan aman.

Standar produk dapat dipenuhi sesuai dengan aturan Pemerintah Standarisasi Nasional Indonesia. Ada beberapa SNI untuk produk pulp dan kertas yang sudah ada diantaranya

untuk kertas tisu muka, kertas sigaret, kertas cetak salut, kertas gambar, kertas fotokopi, kertas kitab dan lain sebagainya. Proses keluarnya SNI dapat berasal dari inisiatif asosiasi sektor yang menginginkan terbitnya SNI tersebut. APKI berupaya untuk mendukung peningkatan daya saing industri pulp dan kertas di Indonesia, salah satunya yakni memfasilitasi usulan-usulan para anggotanya yang menginginkan terbitnya suatu SNI dan membantu pemerintah untuk mensosialisasikan SNI wajib.

Dari daftar SNI yang ada, pemberlakuan SNI untuk produk pulp dan kertas masih bersifat sukarela. Kesiapan semua pihak sangat diperlukan untuk pemberlakuan SNI wajib mulai dari industri, instansi pemerintah maupun ketersediaan laboratorium terakreditasi. Kementerian Perindustrian mengusulkan SNI wajib kertas tisu (muka, toilet, serbet, towel), kertas sigaret, kertas kemasan makanan bagi industri pulp dan kertas. Sampai saat ini sudah 118 SNI yang terkait dengan dengan industri pulp dan kertas terdiri dari 61 SNI untuk produk kertas dan 57 SNI untuk kriteria pengujiannya. Namun permasalahannya adalah SNI produk kertas itu sudah banyak yang kadaluarsa sehingga harus direvisi. Oleh karena itu APKI harus menetapkan skala prioritas penyusunan SNI berdasarkan pasar produk yang mendominasi di dalam negeri maupun untuk pasar ekspor.

Disamping itu, SNI kriteria ekolabel sebagai wujud kepedulian pada aspek lingkungan dalam proses produksi kertas juga telah diberlakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, diantaranya untuk kertas cetak tanpa salut, kertas tisu untuk kebersihan, kertas kemas, serta kertas cetak salut. Beberapa anggota APKI yang telah mendapatkan SNI Ekolabel adalah PT Pindo Deli Pulp & Paper Karawang, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, PT Riau Andalan Pulp & Paper, PT Indah Kiat Pulp & Paper Perawang, PT Fajar Surya, dan PT Surabaya Mekabox.



## SERBA SERBI

### MENDORONG INDUSTRI KERTAS YANG BERKELANJUTAN

Dalam beberapa dekade terakhir ini perkembangan industri pulp dan kertas di dunia telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan yang juga akan mempengaruhi daya saingnya. Permintaan kertas dari Amerika Utara dan Eropa terus mengalami penurunan karena telah terjadi pergeseran ke pasar negara berkembang, khususnya di Asia sehingga mengakibatkan permasalahan hilangnya lapangan pekerjaan dan berkurangnya profitabilitas di Amerika Utara maupun Eropa. Konsumsi kertas sangat terkait dengan PDB per kapita dan pertumbuhan penduduknya dan pasar negara berkembang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Akibatnya berbagai cara dilakukan oleh industri pulp dan kertas di Eropa dan AS antara lain dengan melakukan serangkaian tindakan defensif perdagangan seperti anti-dumping untuk melindungi pasar domestik mereka. Tantangan yang dihadapi oleh industri pulp dan kertas di berbagai dunia khususnya di negara-negara berkembang adalah berkaitan dengan perluasan pabrik yang cepat, akan tetapi harus diikuti dengan efektifitas dan efisiensi yang tinggi serta berkelanjutan. Mesin pulp dan kertas baru umumnya memiliki kapasitas produksi sangat besar dan sangat mahal namun proses produksinya menjadi lebih bersih. Meningkatnya kebutuhan kertas di Asia seperti di Cina yang konsumsi kertas per kapitanya tumbuh lebih dari 140 persen mengakibatkan perlunya investasi yang lebih banyak lagi agar pasokan pulp dan kertas tidak terganggu.

Akan tetapi di masa mendatang, diperkirakan industri pulp dan kertas di Amerika Utara dan Eropa akan bangkit kembali karena adanya pemulihan ekonomi di kedua kawasan tersebut. Pertumbuhan ini akan bervariasi tergantung pada setiap kategori produk atau

jenis kertas. Permintaan untuk kertas tisu akan terus tumbuh antara 3 – 4% per tahun secara global. Sedangkan di kawasan Asia, pertumbuhan kertas tisu akan lebih besar lagi karena pertumbuhan penduduk akan terkonsentrasi di Asia diikuti pula dengan perubahan gaya hidup (life style). Permintaan kertas kemasan dan kardus juga akan mengalami pertumbuhan yang signifikan khususnya untuk memenuhi sektor logistik dan ekspidisi. Secara keseluruhan, industri pulp dan kertas di pasar Asia akan berkembang menuju ke arah yang positif.

(Sumber: *Paper Asia*, Januari 2014)

### APKI MENGINGINKAN ADANYA PEMBERIAN INSENTIF PADA INDUSTRI PULP DAN KERTAS



Industri ramah lingkungan seperti industri pulp dan kertas sudah selayaknya mendapatkan insentif karena telah memberikan kontribusi terhadap lapangan pekerjaan baik lokal maupun domestik. Seperti halnya industri lainnya di sektor agroindustri, industri pulp dan kertas juga merupakan industri penyumbang devisa negara terbesar. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan pulp dan kertas yang telah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan investasi yang besar sudah selayaknya mendapatkan insentif.

Perusahaan-perusahaan pulp dan kertas yang terintegrasi memerlukan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan tersebut akan menanam kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di HTI nya, dan untuk itu diperlukan investasi dengan jumlah yang besar. Dengan demikian, insentif dapat diberikan dalam

bentuk penyediaan alat dan mesin yang terkait langsung dengan kegiatan hutan tanaman industrinya, atau dengan pembebasan pajak, dan lain sebagainya. Insentif juga dapat diberikan kepada perorangan atau individu, dimana kayu yang mereka tanam dapat dijual ke perusahaan pulp dan kertas sehingga terjadi pola kemitraan antara penduduk atau masyarakat dengan pihak perusahaan.

Pada masa yang akan datang, insentif harus diarahkan untuk industri yang menyediakan sumber bahan baku industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan hutan industrinya dan juga kepada industri pulp dan kertas yang melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka mengembangkan hutan penyangga yang dapat menjaga dan melindungi hutan.

(Sumber: *Paper Asia*, Januari 2014)

## VALMET

Valmet Corp. merupakan anggota baru dari UN Global Compact (UNGC) sejak 13 Januari 2014, sehingga memperkuat komitmen Valmet untuk kegiatan pembangunan yang



United Nations  
Global Compact

berkelanjutan. UN Global Compact merupakan inisiatif yang diprakarsai oleh Kofi Anan, mantan Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2000 sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan di dunia terhadap pembangunan berkelanjutan.

UN Global Compact telah memiliki anggota lebih dari 8000 bisnis dan non bisnis yang tersebar di 135 negara. Anggotanya berinisiatif dan berkomitmen secara sukarela mengikuti 10 prinsip umum antara lain di bidang HAM, tenaga kerja, lingkungan dan anti korupsi. Valmet merupakan suatu perusahaan yang berkecimpung dalam pemasok

teknologi dan layanan kepada pelanggan di bidang proses industri, termasuk industri untuk industri pulp dan kertas. Layanan Valmet mencakup beberapa layanan seperti pembangkit listrik untuk produksi, perbaikan suku cadang serta pemeliharaan peralatan. Kegiatan Valmet selaras dengan prinsip-prinsip dari UN Global Compact, dan pada tahun 2013



Valmet telah memberikan kontribusi dalam hal mengurangi emisi CO<sub>2</sub> sebesar 8%, mengurangi limbah sebesar 23%, serta energi sebesar 9% dan pemakaian air berkurang sebesar 28% (*Paper Asia*, Januari 2014).

Di Indonesia, Valmet telah menandatangani kontrak dengan OKI Pulp & Mills untuk memasok teknologi utama di proyek pabrik pulp di Sumatera Selatan dan peralatan utama yaitu: 2 *biomass gasifiers*, 2 *biomass boilers*, sistem evaporasi, 2 *lime kilns*, serta 2 pengering pulp dengan nilai sebesar EUR 340 (USD 463,5) juta. Pabrik baru ini diharapkan dapat memproduksi 2 juta ton udara kering pulp per tahun dan produksi komersial diharapkan dimulai pada tahun 2016

(Sumber: PPI Magazine, Mei 2014).

## POTENSI KERTAS CETAK DAN TULIS DI PASAR ASIA



Pada tahun 2013, kertas cetak dan tulis di pasar Asia kondisinya kurang menguntungkan, karena margin produsen yang lemah akibat kondisi ekonomi global yang menurun. Menurut RISI, perkiraan permintaan kertas cetak dan tulis di Asia meningkat hanya 0,8% (370.000 ton) atau sedikit di bawah 1,2% dibandingkan tahun 2012, dan jauh di bawah 3,6%

tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global dan regional yang melambat. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya transisi penggunaan media cetak ke media elektronik.

Cina dan Jepang, merupakan dua negara konsumen kertas tertinggi yang memainkan peran dominan dalam menentukan trend pertumbuhan di Asia. Peningkatan permintaan di China berjalan lambat yaitu dari 7% pada tahun 2010 menjadi 1% pada tahun 2013, namun diproyeksikan tingkat pertumbuhannya rata-rata sebesar 1,7% pada tahun 2014 yang dapat meraih keuntungan sebesar 400.000 ton. Pertumbuhan terhadap permintaan kertas di Jepang diperkirakan akan tetap negatif pada tahun 2014 dikarenakan persaingan dari media elektronik dan kenaikan pajak konsumsi. Negara-negara Asia lainnya diprediksi akan mengalami pertumbuhan positif, kecuali Korea Selatan, di mana permintaan terhadap kertas cetak dan tulis diperkirakan menurun sebesar 3%, terutama disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan bahan baku kertas serta sengitnya persaingan media elektronik. Sedangkan untuk wilayah Asia, selain China dan Jepang pertumbuhan terhadap permintaan kertas diproyeksikan tumbuh sebesar 3% dengan kenaikan permintaan total volume sebanyak 365.000 ton.

(Sumber: PPI Magazine, May 2014)

### KESUKSESAN YANG BERKELANJUTAN ITC BHADRACHALAM PULP & PAPER

ITC Bhadrachalam merupakan satu-satunya pabrik pulp di India yang menggunakan konsep *Element Chlorine Free* (ECF) yaitu metode *bleaching* pada proses *pulping* sehingga lebih aman terhadap lingkungan. Selain itu ITC Bhadrachalam juga memiliki tujuh mesin kertas canggih untuk pencetakan, yang dapat menghasilkan kertas cetak dan tulis sebesar 485.000 ton/tahun. Selain itu pembangunan hutan tanaman kayu *eucalyptus* yang memiliki

luas lebih dari 140.000 hektar, dengan tenaga kerja terdiri dari petani-petani lokal serta masyarakat adat di sekitar daerah tersebut.

ITC Bhadrachalam juga telah melakukan penelitian dan menemukan bibit klonal yang unik, yang dikembangkan di Bangalore. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanaman



Dr Usha Rani, kepala manajer (kiri), Dr.H. D. Kulkarni, wakil presiden perkebunan ITC (kanan) dan Dr Ambika Prasad Upadhyay (tidak terdapat di foto), ilmuwan utama, secara luas diakui untuk merintis hutan tanaman di India

kayu tersebut dapat mencapai ketinggian sampai 30 meter hanya dalam waktu tujuh tahun, dengan struktur akar yang dangkal sehingga penggunaan airnya menjadi berkurang.

Kegiatan yang dilakukan ITC Bhadrachalam merupakan model atau pendekatan baru untuk menuju kesuksesan kegiatan usaha yang berkelanjutan di India, karena telah memberdayakan masyarakat petani di sekitar lokasi pabrik. Selain itu, ITC Bhadrachalam berupaya untuk memenuhi

keinginan para pelanggan dalam kaitannya dengan kualitas kertas yang dihasilkan, sehingga menjadikan ITC Bhadrachalam memiliki peran penting dan juga sebagai *rising star* di India.

Berbagai upaya dilakukan seperti penghematan energi serta meminimalkan limbah padat dalam proses produksi. Selain itu bahan baku yang akan digunakan diproduksi dari hutan yang dikelola oleh masyarakat petani sehingga dapat diperoleh secara berkelanjutan, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan hingga sebanyak 400.000 orang.

(Sumber: PPI Magazine, May 2014)



## RAPAT KERJA ANGGOTA APKI SURABAYA



Pada hari Selasa, 13 Mei 2014 diadakan Rapat Kerja Anggota APKI wilayah Jawa Timur dan sekitarnya bertempat di Marriot Hotel, Jalan Embong Malang-Surabaya. Sebelum Rapat Kerja Anggota APKI dimulai, terlebih dahulu dilakukan Rapat Pengurus APKI untuk membahas agenda yang akan disampaikan pada Rapat Kerja Anggota APKI.

Acara dilanjutkan dengan Rapat Kerja Anggota APKI yang dihadiri sekitar 20 orang dari pengurus APKI, tenaga ahli Bapak Hanafi Pratomo, serta wakil dari 8 Perusahaan (Leces, Jaya Kertas, Surya Pamenang, Surabaya Mekabox, Pakerin, Suparma, Surya Zig Zag, Tjiwi Kimia). Bapak Misbahul Huda selaku Ketua Umum APKI dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa Asosiasi sebagai wadah tidak hanya menjadi tempat ketika ada masalah saja melainkan diperlukan partisipasi aktif dari anggotanya, dan mengingatkan kewajiban anggota untuk membayar iuran keanggotaan.

Penyampaian materi presentasi disampaikan oleh Ibu Liana Bratasida selaku Direktur Eksekutif APKI dengan moderator oleh Bapak Yan Partawijaya selaku Waketum VI APKI. Materi yang disampaikan meliputi Masukan APKI kepada Pemerintahan baru dalam rangka meningkatkan kinerja industri pulp dan kertas Indonesia, penyusunan dan penyempurnaan Direktori APKI, Permendag 64/2012 jo 81/2013 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (proses revisi), BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia ) 2017, Permendag 67/2013 jo No. 10/2014 (ketentuan penggunaan label pada kertas fotokopi), UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Draft Peraturan Menteri Perindustrian tentang kewajiban industri melakukan manajemen air dan energi, Permen LH No 15/2013 tentang MRV, isu anti-dumping/safeguard, development product untuk APEC, perkembangan RPP B3, serta pertemuan-pertemuan yang terkait dengan industri pulp dan kertas.



Bapak Hanafi menyampaikan beberapa tanggapan maupun usulan bahwa ketentuan impor produk industri kehutanan perlu disusun. Untuk itu APKI telah mengusulkan kepada Pemerintah untuk memberlakukan Peraturan tentang Impor yang paling tidak setara dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor

Produk-Produk Industri Hasil Hutan. Selain itu, APKI diharapkan juga membantu dan mendorong peningkatan SDM industri pulp dan kertas dengan memanfaatkan pendidikan ATPK. Perlu adanya pertemuan dengan PT Semen Gresik untuk saling bertukar informasi mengenai penanganan masalah limbah dan capaian penurunan emisi GRK. APKI berencana untuk mengundang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Daerah untuk membicarakan permasalahan yang terkait dengan limbah.

Pertemuan dengan anggota APKI wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya di Surabaya akan dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali untuk menjalin komunikasi yang lancar perihal isu-isu terkait dengan industri pulp dan kertas dan solusi yang diharapkan. Agenda yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya yakni sosialisasi UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dengan menghadirkan wakil dari Kemendag. Selain itu presentasi dari PT Semen Gresik untuk penanganan masalah limbah dan penurunan emisi GRK.

## KERJASAMA APKI DAN IDH



Industri pulp dan kertas di Indonesia telah berkembang dengan pesatnya dan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lapangan kerja dan pembangunan ekonomi. Meningkatnya permintaan produk pulp dan kertas di Asia dan dunia menunjukkan bahwa sektor ini akan terus berkembang.

Namun, industri pulp dan kertas Indonesia mendapatkan cukup banyak tantangan baik dari kalangan LSM di dalam negeri maupun internasional, dikaitkan dengan permasalahan penebangan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi karbon yang tinggi. Oleh karena itu, produksi kertas Indonesia menjadi semakin sensitif karena tuntutan LSM sehingga dapat berpotensi atau telah mengganggu pertumbuhan sektor pulp dan kertas. Oleh karena itu, APKI sebagai wadah yang menaungi sektor ini akan bekerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan sekaligus juga harus dapat meningkatkan “image” dari industri pulp dan kertas Indonesia di pasar internasional.

IDH melalui program The Sustainable Initiative for Pulp & Paper (STIPP) akan memberi bantuan teknis bagi sektor industri pulp dan kertas berdasarkan proses pembelajaran dengan praktik (learning by doing) dan inovasi terhadap prinsip-prinsip berkelanjutan. Hal-hal yang dapat dilakukan IDH adalah melakukan dialog bersama dengan semua pihak terkait untuk mencari solusi dalam pencapaian prinsip-prinsip pembangunan. Untuk itu, IDH akan menyediakan dana pendamping untuk melakukan berbagai penelitian yang dapat menunjang tercapainya kegiatan industri pulp dan kertas yang berkelanjutan di Indonesia. STIPP mengharapkan adanya kemitraan antara pelaku industri dan semua pemangku

kepentingan yang terkait sehingga keberlanjutan di seluruh rantai pasokan industri (supply chain) dapat tercapai.

Pada tanggal 12 Juni 2014, penandatanganan MOU antara IDH dan APKI telah dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi industri-industri pulp dan kertas di Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di seluruh mata rantai pasokan. Kerjasama ini juga didukung sepenuhnya oleh Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian yang menghimbau agar seluruh anggota APKI berpartisipasi aktif untuk mendukung dan terlibat dalam program STIPP ini.